

**EVALUASI PENGELOLAAN DAN PELAPORAN  
KEUANGAN DANA PROGRAM STIMULAN OLEH  
KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) DI  
KELURAHAN GUNUNG ELAI KOTA BONTANG**

**SKRIPSI**

Untuk Seminar Proposal



Oleh:

**DEISYA FITRIA SETYOKO PUTRI**

2101036273

**AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA**

**2025**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Evaluasi Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Dana Program Stimulan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Kelurahan Gunung Elai, Kota Bontang

Nama Mahasiswa : Deisya Fitria Setyoko Putri

NIM : 2101036273

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Diajukan Untuk Seminar Proposal

Menyetujui,

Samarinda, 16 Juli 2025

Pembimbing,

Dwi Risma Deviyanti, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CSRS.,CSRA.,CMA.,CPS.,CIBA  
NIP. 197010181995122001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi S1 Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Mulawarman

Dr. Fibriyani Nur Khairin, S.E.,M.S.A.,Ak.,CA.,CSP.,CIQaR  
NIP. 198502042009122007

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1. Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2. Rumusan Masalah</b> .....	4
<b>1.3. Tujuan Penelitian</b> .....	5
<b>1.4. Manfaat Penelitian</b> .....	5
<b>1.4.1. Manfaat Teoretis</b> .....	5
<b>1.4.2. Manfaat Praktis</b> .....	6
<b>BAB II</b> .....	7
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7
<b>2.1. Landasan Teori</b> .....	7
<b>2.1.1. Konsep Tata Kelola Keuangan Daerah</b> .....	7
<b>2.1.2. Konsep Siklus Pengelolaan Keuangan Publik</b> .....	8
<b>2.1.3. Prinsip Good Governance dalam Akuntansi Publik ( Relevansi dengan Pengelolaan Keuangan Pokmas)</b> .....	12
<b>2.1.4. Dasar Regulasi dan Bentuk Pelaporan</b> .....	14
<b>2.1.5. Konsep Sistem Informasi</b> .....	17
<b>2.2. Penelitian Terdahulu</b> .....	19
<b>2.3. Kerangka Berpikir</b> .....	21
<b>BAB III</b> .....	23
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	23
<b>3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian</b> .....	23
<b>3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian</b> .....	23
<b>3.3. Fokus penelitian</b> .....	23
<b>3.4. Sumber Data dan Subjek Penelitian</b> .....	24
<b>3.4.1. Sumber Data</b> .....	24

<b>3.4.2. Teknik Penentuan Subjek Penelitian.....</b>	<b>24</b>
<b>3.5. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>25</b>
<b>3.5.1. Wawancara .....</b>	<b>25</b>
<b>3.5.2. Observasi Partisipatif .....</b>	<b>25</b>
<b>3.5.3. Dokumentasi .....</b>	<b>25</b>
<b>3.6. Teknik Analisis Data .....</b>	<b>25</b>
<b>3.7. Uji Keabsahan Data .....</b>	<b>26</b>
<b>3.8. Rancangan Instrumen Wawancara .....</b>	<b>26</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>28</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Program stimulan adalah salah satu bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong perkembangan pembangunan dengan melibatkan masyarakat. Pada salah satu instansi di Kota Bontang, khususnya di Kelurahan Gunung Elai program tersebut dijalankan dengan menyalurkan alokasi dana kepada sebuah kesatuan secara individu yang dinamakan Kelompok Masyarakat (Pokmas). Dalam hal ini, Pokmas memiliki peran sebagai pelaksana program yang dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan hingga pertanggungjawaban pelaporan keuangan. Pengelolaan alokasi dana untuk program stimulan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Kelurahan Gunung Elai, Kota Bontang, perlu dilakukan pemahaman secara mendalam. Dalam program pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan pemerintah, Pokmas dibentuk sebagai pelaksana yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas wilayah tersebut. Tata kelola keuangan pada Kelurahan sendiri secara garis besar dapat dikatakan cukup baik. Namun dalam praktik pengelolaan dana di dalam program yang dijalankan cukup menjadi sorotan.

Kelurahan Gunung Elai, Kota Bontang, merupakan salah satu wilayah yang menerima alokasi dana stimulan yang langsung disalurkan kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas). Dana tersebut diharapkan mampu menjadi alat pendukung pembangunan di tingkat lokal yang disalurkan melalui kegiatan produktif dan

sosial. Pengelolaan keuangan yang dikerjakan dengan tepat akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan menjadi dasar bahwa dana stimulan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Secara umum, Kelurahan Gunung Elai dapat diilustrasikan sebagai wilayah tingkat lokal yang memiliki tata kelola keuangan yang cukup baik. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat aspek-aspek yang memerlukan tinjauan lebih untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan telah optimal. Pengelolaan dana stimulan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) kerap dihadapkan dengan berbagai kendala seperti pengetahuan tentang manajemen keuangan yang masih terbatas, dokumentasi yang kurang optimal atau teratur, serta keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pemanfaatan serta pelaporan dana yang kurang maksimal. Dengan adanya kondisi ini mampu menimbulkan dampak yang dapat menghambat tujuan program dan kesempatan untuk risiko penyalahgunaan dana akan terbuka.

Penelitian ini dapat dinilai penting untuk menggali secara mendalam dan memberikan gambaran lebih jelas terkait alokasi dana yang dikelola oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Kelurahan Gunung Elai, Kota Bontang. Aspek fundamental dalam keberhasilan berbagai program pembangunan adalah pelaksanaan pengelolaan keuangan yang baik, khususnya melibatkan peran masyarakat (Hasna *et al.*, 2023). Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti pengelolaan dana di suatu instansi, tetapi umumnya spesifikasinya terhadap aparat desa bukan penerima dana dengan program khusus di lingkungan kelurahan seperti Kelompok Masyarakat (Pokmas). Hidayati *et al.*, (2023) mendalami evaluasi kinerja keuangan dengan rasio efektivitas dan efisiensi pada tingkat desa tanpa

menyoroti penganggaran yang bersifat partisipatif. Sementara (Devi *et al.*, 2024), mengidentifikasi peran transparansi, sistem pengendalian internal serta kompetensi aparat terhadap akuntabilitas dengan survei berdasarkan angka dan belum menggali dinamika permasalahan dengan keterlibatan kelembagaan khusus.

Di Indonesia, pengelolaan dana publik cukup menjadi perhatian karena akuntansi sektor publik yang terus bereformasi. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah mengembangkan pendekatan mendasar melalui program pemberdayaan masyarakat dan stimulan, dalam hal ini Kelompok Masyarakat (Pokmas) diberi kewenangan untuk mengelola sebagian anggaran. Namun dalam beberapa kasus penerapannya masih menghadapi kendala mengenai pemahaman literasi keuangan yang rendah dan kurangnya pemahaman tentang prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal pengelolaan dana yang dialokasikan memiliki dampak bagi masyarakat terutama yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat tersebut. Wibowo & Susliyanti (2024) menegaskan bahwa transparansi, akuntabilitas keuangan mampu meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan.

Dalam taraf global, pengelolaan keuangan dengan basis masyarakat telah banyak diadopsi karena dapat memperkuat partisipasi masyarakat terkait alokasi anggaran kota yang memiliki dampak dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Azevedo *et al.*, (2022) menemukan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan dalam setiap tahap siklus anggaran dapat meningkatkan kepercayaan publik serta akurasi alokasi anggaran. Sistem pengelolaan keuangan yang partisipatif berarti memudahkan komunikasi

masyarakat dan meningkatkan pengawasan publik (Pranesti, 2022).

Dengan pendekatan secara mendalam, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara komprehensif pengelolaan keuangan pada alokasi dana stimulan oleh Kelompok Masyarakat di Kelurahan Gunung Elai, Kota Bontang. Penelitian ini sangat penting sebab tanpa penguatan sistem pengelolaan keuangan dan evaluasi secara menyeluruh dapat memicu risiko penyimpangan, kurangnya efisiensi dan pertanggungjawaban yang lemah. Penelitian ini dapat memberi wawasan yang lebih luas terkait praktik pengelolaan keuangan berbasis masyarakat di tingkat lokal yang jarang terjamah dalam penelitian sebelumnya. Hasil penelitian juga dapat menjadi bahan tambahan bagi pembuat kebijakan dalam upaya meningkatkan efektivitas keuangan dan perkembangan program secara keberlanjutan melalui pengelolaan dana yang baik.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti bermaksud untuk meneliti tentang “Evaluasi Pengelolaan Pelaporan Keuangan Dana Program Stimulan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Kelurahan Gunung Elai, Kota Bontang.”

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan hingga pelaporan dana stimulan oleh Kelompok Masyarakat di Kelurahan Gunung Elai?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Kelompok Masyarakat di Kelurahan Gunung Elai dalam pengelolaan keuangan dan bagaimana solusinya?

3. Apakah pengelolaan dan pelaporan keuangan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) sesuai dengan Peraturan Wali Kota No. 5 Tahun 2022 dan memenuhi prinsip tata kelola keuangan publik yang baik?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi pengelolaan dan pelaporan dana stimulan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Kelurahan Gunung Elai, Kota Bontang.
2. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian pengelolaan dana dengan aturan yang berlaku serta prinsip-prinsip tata kelola keuangan (transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan efektivitas).
3. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh Kelompok Masyarakat dalam pengelolaan keuangan beserta solusi penyelesaiannya.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini bermanfaat sebagai literatur dalam pengembangan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan publik pada tingkat lokal seperti Kelurahan. Memiliki dampak berkelanjutan yang berguna untuk penelitian selanjutnya dalam ranah pengelolaan keuangan daerah dan akuntansi sektor publik.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang visible terhadap peningkatan pengelolaan keuangan. Sehingga dapat menciptakan pengelolaan dana yang lebih efektif dan mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat secara luas.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Konsep Tata Kelola Keuangan Daerah**

Tata kelola keuangan daerah adalah suatu prosedur yang mengatur jalannya pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara efisien, efektif, akuntabel dan transparan. Dalam sistem otonomi daerah, pengelolaan keuangan publik dituntut agar mencerminkan prinsip tata kelola keuangan yang baik untuk memenuhi klaim masyarakat terkait layanan publik yang berkualitas. Menurut Halim & Kusufi (2014) secara keseluruhan pengelolaan sumber daya keuangan yang baik dapat meliputi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan serta tahap pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berlaku pada dana yang dikelola oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) dengan pengawasan dan pelaporan yang tetap dalam naungan tanggung jawab pemerintah daerah. Tercapainya sistem pengelolaan keuangan pada suatu daerah ditentukan oleh prinsip tata kelola, kedisiplinan dan keterlibatan sumber daya lokal yang kompeten dalam menjalankan proses keuangan tersebut (Aziyah & Yanto, 2022) Konsep pengelolaan keuangan daerah ini memiliki tujuan utama yaitu memastikan bahwa dana yang disalurkan oleh pemerintah daerah digunakan sesuai dengan tujuan dan dimanfaatkan secara optimal. Tata kelola keuangan merupakan cerminan kondisi suatu pemerintah daerah dan sebagai salah satu jalan bagi

pemerintah untuk mewujudkan pertanggungjawaban keuangannya (Leunupun *et al.*, 2022). Pemerintah daerah memiliki hak strategis dalam penyusunan kebijakan anggaran yang berfokus pada kepentingan publik khususnya masyarakat. Selain itu peran pemerintah juga untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran dalam siklus keuangan daerah.

### **2.1.2. Konsep Siklus Pengelolaan Keuangan Publik**

Pengelolaan keuangan adalah tahapan secara menyeluruh yang terdiri dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap keuangan yang dilaksanakan oleh suatu instansi atau pemerintah sebagai elemen dari pengelolaan keuangan daerah atau negara. Pengertian ini tidak hanya tertuju pada aspek secara teknis akuntansi, tetapi juga terkait dengan konsep transparansi, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana yang berasal dari sumber daya publik (Mardiasmo, 2018).

Alokasi dana program stimulan yang dikelola oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas), perlu dipahami bahwa anggaran yang diterima tidak langsung dari pemerintah kelurahan, tetapi juga bagian dari mekanisme alokasi yang panjang. Tahapan tersebut dimulai dari tingkat Nasional hingga ke level masyarakat. Secara umum, proses penyaluran anggaran dapat digambarkan sebagai berikut:

#### **2.1.2.1. APBN (*Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*)**

Pada umumnya, alokasi anggaran untuk program stimulan atau pemberdayaan masyarakat sumber utamanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran negara didefinisikan sebagai suatu rencana

belanja dan pembiayaan dalam rangka mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian suatu negara dengan periode tertentu. Menurut Halim & Kusufi (2014), anggaran oleh negara memiliki beberapa fungsi, antara lain:

- a. Sebagai kaidah bagi pemerintah untuk pengelolaan negara dalam periode mendatang.
- b. Sebagai dasar pengawasan masyarakat kepada kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah, karena harus mendapat persetujuan DPR terlebih dahulu sebelum negara dijalankan.
- c. Digunakan sebagai alat bagi masyarakat untuk menilai kemampuan pemerintah dalam kebijakan yang dilaksanakan karena anggaran tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada DPR.

Pada setiap tahunnya pemerintah akan menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Kementerian Keuangan yang memuat pertimbangan terhadap prioritas pembangunan nasional dan daerah serta kebutuhan masyarakat (Martini *et al.*, 2023). Dalam arti sempit anggaran yang digunakan untuk pembangunan termasuk program stimulan di suatu daerah berarti rencana pengeluaran dan penerimaan dengan kurun waktu satu tahun. Sebagai bagian dari anggaran belanja pemerintah, alokasi anggaran untuk program ini termasuk dalam anggaran belanja pembangunan sebab dialokasikan untuk mendukung proyek pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat akan menetapkan alokasi dana stimulan tersebut melalui perencanaan dan penetapan anggaran berdasarkan data kebutuhan dan program pembangunan yang dilaksanakan. Kemudian alokasi dana tersebut ditujukan untuk Kementerian atau lembaga teknis

contohnya Kementerian PUPR, Kemendagri, atau instansi terkait pemberdayaan masyarakat.

#### **2.1.2.2. Dana ditransfer ke Pemerintah Daerah (APBD)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat diartikan sebagai perencanaan operasional keuangan dalam pemerintah daerah yang menggambarkan perkiraan pengeluaran untuk membiayai kegiatan, program serta proyek-proyek di daerah dalam satu tahun anggaran tertentu. Dana yang telah diproses dari pemerintah pusat disalurkan ke pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kota Bontang. Dana transfer dimuat dalam dokumen yang berisi pendapatan dan belanja satuan kerja Perangkat Daerah atau dapat disebut dengan dokumen pendapatan, belanja dan pembiayaan satuan kerja untuk melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Melalui mekanisme yang telah ditentukan, transfer dana yang dilakukan berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ditujukan kepada prioritas pemerintah pusat di daerah yaitu proyek-proyek yang berkaitan dengan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Herminawaty Abubakar, 2021). Kemudian pencairan dana dilakukan melalui rekening kas daerah dan pemerintah akan mengelola dana tersebut dalam rancangan APBD dengan persetujuan DPRD setempat. Setelah itu pemerintah daerah akan melakukan pendampingan dan pengawasan awal atas penggunaan dana hingga pelaksanaan program untuk memastikan bahwa dana telah dimanfaatkan secara efektif.

#### **2.1.2.3. Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Kecamatan**

Kelurahan Gunung Elai sebagai salah satu unit pemerintahan di Kota

Bontang menerima dana program stimulan dari dinas terkait. Sebelum dana tersebut sampai ke pihak Kelurahan, alokasi anggaran diserahkan pada anggaran Kecamatan untuk dialokasikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah (Saren *et al.*, 2022). Dengan demikian, sistem anggaran Kecamatan akan mendistribusikan anggaran kepada seluruh kelurahan menyesuaikan dengan data prioritas kebutuhan pada setiap kelurahan. Proses penerimaan dilakukan setelah rancangan anggaran dan program atas usulan lurah telah disetujui.

#### **2.1.2.4. Kelurahan sebagai Pelaksana Anggaran**

Berdasarkan usulan pihak kecamatan sebagai penyusun rencana kerja dan anggaran, Wali Kota akan menetapkan Lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melaksanakan Program Stimulan. Dalam pelaksanaannya, Lurah akan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan menunjuk pejabat penatausahaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Wali Kota juga menetapkan seorang bendahara pengeluaran pembantu berdasarkan usulan Lurah melalui Bendahara Umum Daerah (BUD). Berikutnya, pejabat teknis kegiatan dan pejabat pengadaan akan ditunjuk oleh camat untuk kegiatan Program Stimulan. Pejabat teknis kegiatan melakukan perencanaan hingga pelaksanaan teknis kegiatan yang dilakukan dalam program tersebut sementara pejabat pengadaan melakukan pengadaan barang/jasa untuk kegiatan Program Stimulan dilaksanakan melalui swakelola tipe IV. Swakelola tipe IV yaitu perencanaan yang dibuat oleh perangkat daerah penanggung jawab anggaran atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat

(Pokmas) Setelah penentuan struktur pelaksana anggaran, maka KPA, pejabat penatausahaan keuangan, pejabat teknis kegiatan serta pejabat pengadaan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan program tersebut.

#### **2.1.2.5. Kelompok Masyarakat sebagai Subjek Pengelola Dana**

Kelompok Masyarakat merupakan suatu sistem dalam masyarakat yang melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBD. Pelaksanaan Program Stimulan melibatkan Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebagai subjek pengelola utama dari dana yang disalurkan. Dana stimulan yang diterima masuk ke tahap koordinasi yang dilakukan oleh kelurahan dengan berbagai pihak terkait dengan program tersebut termasuk Kelompok Masyarakat (Pokmas). Berdasarkan jenis kegiatan yang diselenggarakan, Program Stimulan terdiri atas pengembangan *urban farming*, pengembangan usaha mikro dan pemberian makanan tambahan bagi balita. Dalam proses ini kelurahan melakukan pendataan terhadap Kelompok Masyarakat yang terdiri dari beberapa Rukun Tetangga (RT) yang menjadi penerima dan mendata kebutuhan yang harus dipenuhi. Dana akan dicairkan ke rekening operasional Pokmas dan pada umumnya diterima atas nama ketua dan bendahara. Setelah pendataan dilakukan, kelurahan akan memfasilitasi proses pengelolaan dana pada Kelompok Masyarakat sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan petunjuk teknis kegiatan.

#### **2.1.3. Prinsip Good Governance dalam Akuntansi Publik ( Relevansi dengan Pengelolaan Keuangan Pokmas)**

Dalam ruang lingkup akuntansi sektor publik, prinsip *Good Governance* sebagai landasan penting yang dapat menjamin pengelolaan anggaran terlaksana

dengan transparan, akuntabel serta tepat tanggap pada kebutuhan masyarakat. Tidak hanya berlaku bagi institusi pemerintahan yang besar, namun juga harus diterapkan hingga tingkat komunitas seperti Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang memiliki peran inti dalam berjalannya program ini. Mardiasmo (2018), menyatakan bahwa *Good Governance* merupakan pedoman yang menjadi landasan pokok dalam pengelolaan keuangan publik agar mudah dipertanggungjawabkan kepada masyarakat untuk menjalankan anggaran secara disiplin dan mencegah segala bentuk penyimpangan administratif.

Penerapan prinsip *Good Governance* dalam rangkaian pelaksanaan dan pengelolaan dana untuk program stimulan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) dapat dilihat dari beberapa poin, antara lain:

- 1) Transparansi, ditunjukkan dalam penggunaan dan pengelolaan dana hingga laporan keuangan yang disampaikan.
- 2) Akuntabilitas ditunjukkan melalui pertanggungjawaban dalam bentuk tertulis terhadap laporan kegiatan dan keuangan.
- 3) Partisipasi, umumnya dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan berdasarkan kebutuhan masyarakat.
- 4) Berkelanjutan, hasil pelaksanaan program oleh Pemerintah Daerah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam jangka waktu yang panjang.

Implementasi prinsip *Good Governance* mampu meningkatkan kualitas pelaporan dan pengawasan terhadap keuangan di tingkat kecil seperti desa atau

kelurahan karena dengan landasan ini dapat mengidentifikasi masalah serta mengambil keputusan yang tepat (Sriwahyuni & Fatmawati, 2021). Sebagai pelaksana teknis, Pokmas di Kelurahan Gunung Elai menjadi salah satu yang memiliki tanggung jawab langsung atas dan publik sehingga prinsip ini cukup krusial untuk menjadi pedoman. Secara struktural pemerintahan, Pokmas tidak berstatus sebagai entitas akuntansi secara formal, namun Pokmas harus mampu menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang dijalankan patuh dan berlandaskan prinsip-prinsip sebab sumber dana yang dialokasikan berasal dari APBD/APBN.

#### **2.1.4. Dasar Regulasi dan Bentuk Pelaporan**

Dana yang disalurkan untuk program stimulan kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) harus dikelola dengan berlandaskan prinsip legalitas dan akuntabilitas yang telah diatur dalam beberapa regulasi oleh pemerintah. Dasar regulasi tersebut sebagai rancangan normatif serta dasar teknis dalam penilaian terhadap kepatuhan pengelolaan keuangan yang dijalankan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas). Dasar hukum utama yang menjadi salah satu acuan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang dimuat dalam pasal 298 ayat 1, dijelaskan bahwa *“Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.”* Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan publik tanpa

terkecuali alokasi dana program stimulan wajib memenuhi standar dan prinsip tata kelola keuangan yang telah diatur oleh hukum agar dapat mencapai tujuan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bontang No. 5 Tahun 2022 bahwa pelaksanaan kegiatan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki sekretariat dengan alamat yang jelas di lokasi pelaksanaan kegiatan.
2. Memiliki kemampuan dalam menyediakan barang/jasa yang diswakelolakan berdasarkan surat pernyataan.
3. Anggota yang termasuk bagian Kelompok Masyarakat (Pokmas) tidak memiliki jabatan atau berstatus sebagai aparatur pemerintahan dan tenaga kontrak Daerah.

Perencanaan kegiatan program stimulan meliputi penyusunan kerangka acuan kerja dan perkiraan biaya atau rencana anggaran biaya yang disusun oleh Lurah selaku PPK. Lurah wajib melakukan koordinasi persiapan setelah dokumen pelaksanaan anggaran dengan mengutamakan perhatian pada penetapan sasaran yang telah disepakati. Pejabat Pembuat Komitmen akan meminta Kelompok Masyarakat (Pokmas) untuk mengajukan proposal dan rencana anggaran. Rencana anggaran tersebut digunakan sebagai dasar pengajuan anggaran untuk Swakelola tipe IV. Penyusunan rencana anggaran Swakelola meliputi:

1. Upah tenaga kerja, honor narasumber, honor tim penyelenggara.
2. Biaya bahan dan peralatan apabila diperlukan.

3. Biaya lainnya, seperti pelaksanaan rapat atau penyusunan laporan.

Penyusunan total biaya harus dilakukan secara rinci termasuk dalam biaya bulanan dan biaya mingguan dengan syarat tidak melebihi batas anggaran yang telah ditetapkan pada dokumen pelaksanaan anggaran. Ketika usulan proposal rencana anggaran telah disusun maka PPK akan mengkaji ulang susunan rencana anggaran tersebut dan menyusun rancangan kontrak yang terkait dengan selisih biaya yang diusulkan dengan anggaran yang disetujui, menetapkan teknis acuan kerja, berita acara hasil negoisasi dan tanda tangan resmi kontrak dengan pimpinan Kelompok Masyarakat (Pokmas).

Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan pada pelaksanaan kegiatan berdasarkan kontrak Swakelola yang telah diatur:

- a. Pelaksanaan sesuai dengan kerangka acuan kerja.
- b. Pengajuan kebutuhan harus sesuai dengan rencana kegiatan.
- c. Penggunaan tenaga kerja, sarana/prasaranan serta peralatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan.
- d. Membuat laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja dan sarana/prasarana serta peralatan/bahan.
- e. Membuat laporan Swakelola dan dokumentasi sesuai dengan dokumen kontrak.
- f. Pemanfaatan anggaran untuk kegiatan yang dilakukan oleh Pokmas dilaksanakan dengan cara pemindah bukuan, transfer uang dalam hal belanja dan pembiayaan serta penarikan tunai untuk upah kerja.

Laporan alokasi anggaran kegiatan Program Stimulan wajib disampaikan oleh Lurah kepada Camat pada setiap semester. Pelaporan keuangan pada program yang dilaksanakan dibuat pada dua tahap, yaitu:

1. Laporan semester I yaitu pertanggungjawaban dana disampaikan paling lambat minggu kedua di bulan Juli.
2. Laporan semester II yaitu laporan akhir disampaikan paling lambat minggu kedua di bulan Januari pada tahun berikutnya.

Laporan yang wajib disusun dapat mencakup, sebagai berikut:

1. Laporan pertanggungjawaban keuangan, yaitu mencakup dokumen keuangan resmi yang meliputi kwitansi, faktur, buku kas dan kuitansi bermaterai.
2. Berita acara hasil pelaksanaan dibuat secara lengkap terdiri dari dokumentasi pelaksanaan, notulen kegiatan dan daftar hadir.
3. Surat pernyataan yang dibuat oleh Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) pada setiap pencairan dana.
4. Rekening bersama dengan atas nama Ketua dan Bendahara Pokmas di Bank Pemerintah.
5. Laporan terkait kemajuan Fisik dan Keuangan yang dibuat secara berkala kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan masyarakat melalui forum rembung warga.

#### **2.1.5. Konsep Sistem Informasi**

Sistem informasi akuntansi merupakan salah satu aspek fundamental dalam

pengelolaan keuangan di sektor publik. Meskipun Kelompok Masyarakat (Pokmas) berada pada tingkat yang sederhana, tetapi tidak jauh berbeda dengan perangkat pemerintah yang berada di level atas. Dalam sistem informasi akuntansi, sistem ini adalah proses pencatatan, mengolah data dan menyimpan data yang bertujuan menghasilkan informasi dalam mengambil keputusan (Romney & Steinbart, 2015).

Bagian-bagian yang menjadi dasar sistem informasi yang relevan dengan Pokmas, sebagai berikut:

- a) Menginput data, dapat berupa dokumentasi terkait dana yang masuk, bukti pengeluaran, kwitansi, dan faktur.
- b) Pencatatan, dalam tahap pencatatan dapat berbentuk buku kas atau tabel sederhana.
- c) Proses dan Pelaporan, menyelaraskan antara rencana dengan realisasi, kas, dan dokumentasi yang dilaporkan.
- d) Audit dan kontrol, segala bentuk proses aktivitas terkait kegiatan terutama keuangan memungkinkan untuk diaudit atau diperiksa.

Elemen-elemen di atas penting untuk diperhatikan karena kualitas laporan keuangan didasarkan pada keakuratan dan ketepatan input meskipun bentuknya sederhana, tetap memiliki peran yang besar dalam akuntabilitas dan efisiensi laporan keuangan (Sartika & Aritonang, 2025).

## 2.2. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Metode	Temuan	Relevansi
1	Romy Dwi Putra, R Ery Wibowo, Nurcahyono	2021	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Studi Kecamatan Losari	Kuantitatif	Kontrol Internal berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan dan teknologi informasi memberi dampak negatif	Faktor akuntansi publik dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan
2	Suci Aulia Salsabila, Samirah Dunakhir, Samsinar	2025	Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Desa Dampang Kabupaten Bulukumba)	Studi Kasus	Proses pengelolaan keuangan secara tahapan sudah baik namun pada pelaporan belum dilakukan secara optimal	Dapat membandingkan siklus keuangan publik di Desa dengan Kelompok mAsyarakat yang diselenggarakan Pemerintah Kota melalui Kelurahan
3	Aldofus Lotak, Maria Nona Dince, Wihelmina Maryetha Yulia Jaeng	2024	Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Desa	Studi Kasus	Pada Sistem informasi dan secara prosedur sudah baik, tetapi proses pelaporan kurang cepat	Relevan dalam evaluasi pada sistem informasi yang digunakan dan prosedur pelaporan keuangan
4	Anton Robiansyah & Ainun Srimulyani	2023	Analisis Implementasi Good Governance dalam Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Kota Metro	Kualitatif	Prinsip tersebut dan sistem informasi memiliki kontribusi terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah	Sebagai landasan teori dalam prinsip pengelolaan keuangan dan sistem informasi keuangan di sektor publik.

Kajian penelitian terdahulu di atas merupakan bagian dari penerapan konsep pengelolaan keuangan sektor publik dari beberapa daerah dengan konteks yang

kurang lebih mendekati penelitian ini. Namun, penelitian yang secara khusus berkaitan dengan pengelolaan dana publik oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) di bawah naungan pemerintah spesifikasi lingkungan kelurahan masih cukup terbatas. Oleh karena itu peneliti meninjau beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan keterkaitan dari segi tema dan variabel.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra *et al.*, (2021) menemukan bahwa akuntabilitas keuangan di Desa dapat dipengaruhi oleh kontrol internal dan tata kelola keuangan yang partisipatif, namun pemanfaatan teknologi informasi justru berpengaruh negatif. Penelitian ini juga menyoroti peran sumber daya manusia dapat menjadi bagian dari tantangan dalam pengelolaan dana. Selanjutnya, Usri *et al.* (2025) melakukan penelitian terkait pengelolaan dana desa terkait proses siklus keuangan di desa yang telah berjalan dengan baik namun pada tahap pelaporan masih ditemukan keterlambatan. Penelitian cukup relevan dengan menunjukkan bahwa pada proses pelaporan keuangan masih menjadi persoalan yang menjadi titik lemah dalam proses pengelolaan keuangan, sama halnya pada tingkat mikro seperti Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Kelurahan.

Sementara itu, penelitian oleh Lotak *et al.*, (2024) meneliti suatu sistem dan prosedur akuntansi yang digunakan di Desa Geliting dan menemukan bahwa meskipun secara prosedur sudah benar menurut ketentuan yang berlaku, proses pelaporan yang lambat masih menjadi persoalan. Selain itu masih terdapat kendala dalam penggunaan sistem informasi akuntansi yang bisa dikatakan cukup terbatas. Sehingga dengan adanya temuan tersebut menunjukkan bahwa sistem informasi dan efektivitas pengelolaan keuangan publik memiliki hubungan yang kuat.

Terakhir, Robiansyah & Srimulyani (2023), melakukan observasi mendalam terkait penerapan Good Governance pada sistem informasi keuangan di pemerintahan Kota Metro. Pada penelitian ini ditemukan bahwa penerapan prinsip ini berkontribusi terhadap kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan dapat membantu menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat. Hal ini merujuk pada komponen penting bagi pengelolaan keuangan oleh Pokmas agar dapat mengadopsi prinsip tata kelola keuangan yang baik.

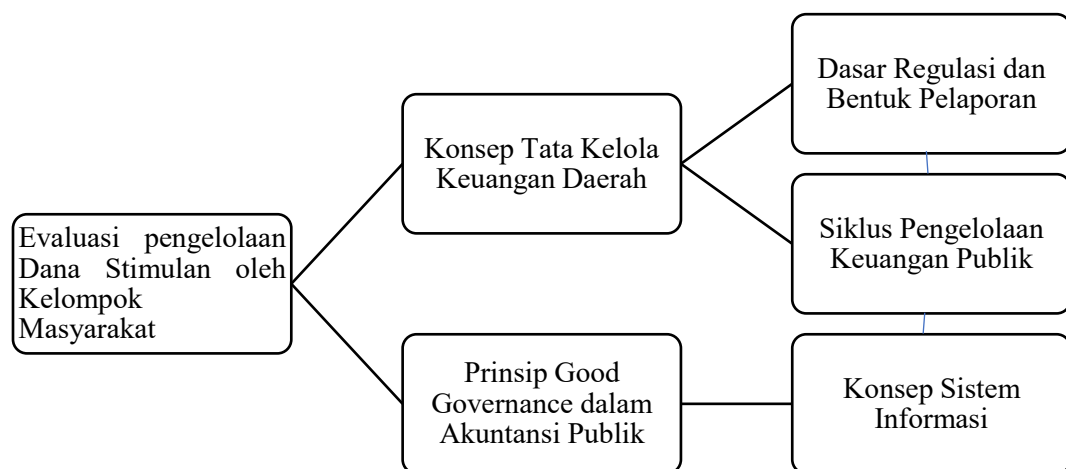
### **2.3. Kerangka Berpikir**

Penelitian ini dilakukan didasarkan oleh kebutuhan untuk mencari pemahaman terkait kesesuaian pengelolaan keuangan pada program stimulan yang disalurkan kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) dengan prinsip akuntansi publik. Agar dapat menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini dilaksanakan dengan bergantung pada beberapa konsep utama, yaitu:

1. Konsep tata kelola keuangan daerah. Konsep ini memberi pemahaman tentang alur pengelolaan keuangan yang dimulai dari proses perencanaan hingga menyusun laporan keuangan.
2. Dasar regulasi. Sebagai pedoman secara legal dan administrative dalam pengelolaan dana publik.
3. Siklus pengelolaan keuangan. Menunjukkan proses pengelolaan keuangan secara lengkap.
4. Prinsip Good Governance. Sebagai acuan untuk menilai bahwa pengelolaan telah sesuai dengan prinsip yang seharusnya.

5. Konsep sistem informasi. Mengidentifikasi peran teknologi untuk mendukung setiap proses pengelolaan terkait pelaporan serta penggunaan anggaran oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas).

Berikut struktur kerangka berpikir yang menggambarkan alur logika penelitian ini:



*Gambar 1*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penggunaan pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami secara mendalam tentang pengelolaan dan pelaporan keuangan alokasi dana program stimulan yang dijalankan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) secara nyata di lapangan. Menurut (Moleong, 2018), pendekatan kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mendalami suatu fenomena sosial dengan melibatkan sudut pandang partisipan, sehingga tidak bertujuan untuk menguji hipotesis tertentu. Sementara itu, dengan penelitian studi kasus digunakan peneliti untuk menjawab perihal suatu peristiwa dalam keadaan tertentu yang terjadi di lapangan (Yin, 2018).

#### **3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang. Sementara itu, waktu pelaksanaan penelitian akan menyesuaikan setelah persiapan selesai termasuk ketersediaan data dan kesediaan informan.

#### **3.3. Fokus penelitian**

Penelitian ini mengacu pada beberapa fokus penelitian berikut:

- a) Mekanisme perencanaan dan penganggaran pada alokasi dana program stimulan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas).
- b) Proses penyaluran anggaran yang berasal dari pemerintah hingga ke Kelompok Masyarakat (Pokmas).
- c) Prosedur pencatatan dan pelaporan antara Kelurahan dan Pokmas.
- d) Evaluasi terhadap pelaksanaan keuangan dari sudut pandang transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan pada regulasi.
- e) Peran kelurahan beserta pihak yang bersangkutan dalam pengawasan dan pendampingan program.

### **3.4. Sumber Data dan Subjek Penelitian**

#### **3.4.1. Sumber Data**

Data penelitian yang digunakan terbagi menjadi dua bagian yang terdiri dari:

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari wawancara secara langsung dengan informan serta observasi lapangan secara langsung.
- b) Data Sekunder, yaitu data berupa dokumen yang dapat berbentuk laporan keuangan, berita acara serta arsip administrasi yang disediakan oleh informan.

#### **3.4.2. Teknik Penentuan Subjek Penelitian**

Dalam penelitian pemilihan subjek penelitian ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tema penelitian. Penentuan informan terdiri dari:

- a) Ketua dan bendahara Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebagai penerima dana.

- b) Aparatur Kelurahan Gunung Elai yang memiliki peran dan terlibat dalam pembinaan dan pelaporan Kelompok Masyarakat (Pokmas).
- c) Perangkat perwakilan dari kecamatan atau pihak terkait (jika diperlukan).

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

#### **3.5.1. Wawancara**

Wawancara akan dilakukan secara semi-terstruktur guna informasi mendalam terkait pengelolaan dana stimulan, proses penyusunan laporan, kendala dalam pelaksanaan. Proses wawancara akan direkam atas izin informan dan informasi akan didokumentasikan melalui catatan lapangan.

#### **3.5.2. Observasi Partisipatif**

Peneliti akan melakukan observasi pada proses administratif dan aktivitas pengelolaan dana, seperti rapat Pokmas hingga proses penggunaan dana.

#### **3.5.3. Dokumentasi**

Memadukan dokumentasi sebagai data pendukung seperti laporan penerimaan dan pengeluaran, laporan pertanggungjawaban keuangan, berita acara kegiatan, notulen rapat, dan lain sebagainya sesuai dengan kesediaan data di lapangan serta informan.

### **3.6. Teknik Analisis Data**

Analisis data meliputi tiga tahap, yaitu:

1. Reduksi Data, yaitu proses pemilihan dan penyederhanaan data dari hasil wawancara dan dokumentasi agar sesuai dengan fokus penelitian.

2. Penyajian Data, yaitu menyajikan data dengan menyusun narasi, tabel, bagan atau matriks agar mempermudah dalam penarikan kesimpulan.
3. Kesimpulan, yaitu menemukan inti, makna serta pola dari keterkaitan antar data yang dapat diverifikasi melalui triangulasi data.

### **3.7. Uji Keabsahan Data**

Agar dapat menjaga validitas data penelitian, maka penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

- a) Triangulasi Sumber, yaitu membandingkan data dari informan untuk menguji konsistensi informasi yang didapatkan.
- b) Triangulasi Teknik, yaitu mengumpulkan wawancara, hasil observasi dan hasil dokumentasi guna mendapatkan gambaran secara utuh.

### **3.8. Rancangan Instrumen Wawancara**

Pertanyaan wawancara penelitian disusun berdasarkan fokus penelitian dengan pendekatan studi kasus. Secara ringkas pertanyaan wawancara terdiri dari:

1. Bagaimana mekanisme perencanaan dalam menggunakan dana stimulan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas)?
2. Jenis kegiatan apa saja yang didanai oleh anggaran tersebut?
3. Bagaimana proses/tahapan pencairan dan pengelolaan anggaran pada entitas tersebut?
4. Apa saja bentuk laporan keuangan disusun oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas)?

5. Apa saja tantangan/kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan tersebut?
6. Bagaimana konsep penyaluran anggaran dari pemerintah daerah (APBD) hingga ke Kelompok Masyarakat (Pokmas)?
7. Bagaimana pembinaan dan pendampingan yang diberikan kelurahan terhadap Pokmas?
8. Bagaimana bentuk implementasi keterbukaan dan pertanggungjawaban informasi keuangan oleh Pokmas?

## DAFTAR PUSTAKA

- Azevedo, R. R. de, Cardoso, R. L., Cunha, A. S. M. da, & Wampler, B. (2022). Participatory Budgeting and Budget Dynamics in Public Sector. *Revista de Contabilidade e Organizações*, 16. <https://doi.org/10.11606/issn.1982-6486.rco.2022.193141>
- Aziyah, W., & Yanto, H. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderating. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1), 977–989. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.686>
- Devi, A. S., Ahmad, A. W., & Sriyunianti, F. (2024). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *JAAB: Journal of Applied Accounting And Business*, 6 (2), 1–10.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah* (E. S. Suharsi, Ed.; 2nd ed.). Penerbit Salemba Empat.
- Hasna, K., Yusmina, N., & Siswanto, D. (2023). Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah Berdasarkan Hasil Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 157–180.
- Herminawaty Abubakar, M. E. (2021). *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah* (A. Musfirah, Ed.). Pusaka Almada.
- Hidayati, R. S., Yulianti, N. C., & Halim, M. (2023). Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Dan Rasio Pertumbuhan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 6(2), 2623–2596.
- Leunupun, P., Persulesy, G., & Souhuwat, M. Y. (2022). Pengelolaan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Owner*, 6(3), 1364–1376. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.884>
- Lotak, A., Dince, M. N., & Jaeng, W. M. Y. (2024). Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(3), 543–571. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i3.2431>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Terbaru). ANDI.
- Martini, R., Masnoni, Betri, & Oktariadi, E. (2023). Analisis Prosedur Pencairan Dana APBN Mekanisme Uang Persediaan, Langsung, dan Tambahan Uang Persediaan Pada Balai Pengadaan Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan

- Lahan Wilayah Sumatera (BPPIKHL). *Jurnal Sustainability: Riset Akuntansi*, 1, 67–90.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Revisi). Remaja Rosdakarya .
- Pranesti, A. (2022). Kajian Sistem Penganggaran Partisipatif Pemerintah Daerah Melalui E-Government Sebagai Wujud Good Governance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3 (1), 144–152.
- Putra, R. D., Wibowo, R. E., & Nurcahyono, N. (2021). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Studi Kecamatan Losari*. 11(2), 110. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/MAX>
- Robiansyah, A., & Srimulyani, A. (2023). Analisis Implementasi Good Governance Dalam Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Kota Metro. *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 12(4), 383. <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v12i4.74858>
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2015). *Accounting Information Systems* (15th ed.). Pearson.
- Saren, C. M., Tinangon, J. J., Warongan, J. D. L., Studi, P., Akuntansi, M., Ekonomi, F., Bisnis, D., Ratulangi, S., & Kampus, J. (2022). Analisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Kelurahan Di Kecamatan Tembaga Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL"*, 13(1), 2022.
- Sartika, I. E., & Aritonang, R. D. (2025). Pengaruh Input Data yang Akurat, Input Data Secara Tepat Waktu, Kejelasan Data yang Diinput dan Kelengkapan Data yang Diinput pada Aplikasi Sakti Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah. *JAFM: Journal of Accounting and Finance Management*, 6(2), 732–747. <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i2>
- Sriwahyuni, E. S., & Fatmawati. (2021). Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa Kuala Alam Kecamatan Bengkalis. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(2), 165–177.
- Usri, S. A. S., Dunakhir, S., & Samsinar. (2025). Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Desa Dampang Kabupaten Bulukumba). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 5(2), 23–31. <https://doi.org/10.55606/jurimea.v5i2.965>
- Wibowo, A. T., & Susliyanti, E. D. (2024). Pengaruh Transparansi Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan terhadap Kepuasan Masyarakat di Kecamatan

Kemalang Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 4(2), 67–76. <https://doi.org/10.55587/jla.v4i2.116>

Yin, R. K. (2018). *Studi Kasus: Desain dan Metode* (E. Yulianto, Trans.; 6th ed.). Rajagrafindo Persada.